

ABSTRAK

Muhammad Siddiq Ihsany: Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji (Studi Deskriptif di Kementerian Haji Kabupaten Bandung).

Penyelenggaraan bimbingan manasik haji di Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun kemandirian jemaah di Tanah Suci. Kebijakan “manasik sepanjang tahun” dari Kementerian Haji menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesiapan jemaah, namun di Kabupaten Bandung pelaksanaannya masih terkendala variasi frekuensi manasik antar kecamatan, keterbatasan pembimbing berkualifikasi, serta kompleksitas koordinasi antara Kemenhaj Kabupaten dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Penelitian ini bertujuan menganalisis komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi dan mekanisme koordinasi dalam implementasi kebijakan bimbingan manasik haji di Kabupaten Bandung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, berlandaskan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980) yang meliputi variabel komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi pelaksana (*dispositions*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan dari Kemenhaj Pusat ke Kemenhaj Kabupaten Bandung dan KBIHU sudah berjalan cukup baik, meski masih ada kelemahan pada kecepatan dan keseragaman penyampaian informasi. Dari sisi sumber daya, ditemukan ketimpangan serius, terutama rasio pembimbing terhadap jemaah yang mencapai 1:80 (jauh dari ideal 1:30), disertai sarana prasarana yang tidak merata antarkecamatan dan keterbatasan anggaran. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen dan dedikasi tinggi yang menjadi kekuatan utama dalam mengimbangi keterbatasan sumber daya, meski perbedaan kualitas antar-KBIHU dan persoalan insentif masih menjadi tantangan jangka panjang. Struktur birokrasi telah didukung SOP dari petunjuk teknis pusat, tetapi implementasinya di tingkat kecamatan serta sistem monitoring-evaluasi masih perlu diperkuat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bimbingan Manasik Haji, KBIHU, Edwards III (1980), Kabupaten Bandung